

GENDER MAINSTREAMING DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Oleh : Dati Fatimah¹

Makalah ini merupakan hasil kerjasama antara
[CIRCLE Indonesia](#) dan [HIVOS](#)
untuk program peningkatan kapasitas dalam manajemen bencana

Gender dan Bencana

Berturut-turutnya bencana yang melanda Indonesia menyadarkan, bahwa bencana adalah bagian dari kehidupan keseharian masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan bijak. Dalam kondisi seperti di atas, kesadaran dan tanggap akan bencana ini juga membuat upaya respon terhadap bencana menjadi tidak hanya terbatas pada aspek kuratif saja. Respon sistematis terhadap bencana, diperlukan baik melalui *disaster preparedness*, tahap emergency ketika bencana terjadi, dan tahap recovery yang mencakup rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan melihat tahapan tersebut, pembelajaran atas respon bencana yang diikuti oleh kebijakan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, juga menjadi bagian penting. Dengan *disaster preparedness* yang memadai misalnya, maka kebijakan tata ruang, infrastruktur dan pemukiman, hingga kepada pembangunan sosial budaya serta ekonomi membuat masyarakat juga menjadi siap dan sadar bila mana bencana terjadi, serta membuat dampak bencana menjadi lebih bisa diminimalkan.

Respons ini juga harus disusun dan diimplementasikan dengan menghitung stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Stratifikasi ini bisa merupakan gambaran masyarakat berdasarkan status ekonomi, lingkungan geografis, hingga stratifikasi berdasar suku, agama, ras, dan juga gender. Analisis dengan menghitung perbedaan ini menjadi penting karena perbedaan kelompok bisa berarti perbedaan kerentanan terhadap bencana,

¹ Penulis adalah konsultan dan penulis lepas untuk isu-isu gender dalam anggaran, korupsi dan bencana, yang dipelajarinya dari berbagai interaksi dengan beragam komunitas perempuan di beberapa daerah. Laporan ini disusun sebagai catatan dengan mendasarkan pada proses mentoring “Peredaman Risiko Bencana” bagi mitra-mitra Hivos di Jawa Tengah dan DIY. Proses mentoring ini difasilitasi oleh tim fasilitator dari DREAM UPN bekerja sama dengan fasilitator dari 3 lembaga mitra Hivos yaitu Persepsi-Setara di Gantiwarno, FKISP di Kemalang –keduanya di wilayah kabupaten Klaten, dan RTND di Piyungan, Bantul, Jogjakarta.

berarti memiliki kebutuhan yang berbeda, dan yang juga penting adalah perbedaan akses terhadap sumber daya untuk pemulihan setelah terjadi bencana.

Salah satu isu kunci yang menjadi *concern* dari proses mentoring dalam peredaman risiko bencana ini adalah memastikan bahwa analisis gender menjadi perspektif yang terintegrasi di dalamnya. Beberapa alasan yang mendasari mengapa integrasi perspektif ini begitu penting, akan dielaborasi dalam analisis kerentanan, analisis dampak, relasi antar pihak dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk membuat upaya antisipasi bencana menjadi lebih terkelola dengan baik. Adalah penting untuk memandang bahwa *gender mainstreaming* dalam pengurangan risiko bencana berarti mendorong perempuan agar memiliki posisi kunci dalam manajemen, kepemimpinan dan juga dalam pengambilan keputusan program penanganan bencana. Juga harus diperhatikan, karena pengurangan risiko bencana adalah bagian integral dari pembangunan, maka *gender mainstreaming* dalam proses ini juga berarti upaya mendorong kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan masyarakat.

Deklarasi Beijing dan Rencana Aksinya dengan jelas mengakui bahwa degradasi lingkungan dan bencana mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan seringkali membawa dampak langsung yang lebih bagi perempuan. Sesi khusus ke-23 dari General Assembly pada tahun 2000 juga mengidentifikasi bencana alam sebagai tantangan terkini yang bisa mempengaruhi implementasi menyeluruh dari rencana aksi Beijing ++ ini. Karenanya, dibutuhkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan dan implementasi pencegahan bencana, mitigasi dan strategi recovery.

Analisis Kerentanan

Salah satunya variabel penting yang harus diperhitungkan adalah bahwa bencana yang sama bisa membawa dampak yang berbeda bagi kelompok gender yang berbeda. Sama-sama terjadi bencana banjir atau gempa misalnya, dampak yang ditimbulkan bagi laki-laki dan perempuan tidaklah identik, yang salah satunya disebabkan oleh perbedaan kerentanan terhadap bencana karena relasi gender yang ada. Laporan UN/IASC juga menuliskan bahwa struktur relasi gender adalah bagian dari konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi kapasitas komunitas untuk mengantisipasi, menyiapkan diri, mempertahankan diri dan juga melakukan pemulihan karena bencana.

Penulis menyimpan beberapa catatan kecil dari kejadian bencana gempa 27 Mei 2006 yang melanda Jogjakarta dan Jawa Tengah, yang menjadi indikasi penting perbedaan kerentanan tersebut. Di dusun Karangasem, Pundong Bantul misalnya, gempa yang terjadi pada pagi hari tersebut, mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Mayoritas diantara mereka adalah perempuan lansia, yang saat kejadian sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi dan terlambat menyadari terjadinya gempa. Sementara di salah satu dusun di kecamatan Sewon di Kabupaten yang sama, gempa mengakibatkan 3 orang meninggal, dan semuanya adalah perempuan. Salah seorang diantara korban sebetulnya sudah bisa keluar dari rumah ketika gempa terjadi, tetapi peran pengasuhan yang diembannya membuatnya masuk kembali ke rumah setelah ingat anaknya masih tertinggal di dalam. Si anak sendiri sebetulnya sudah berhasil keluar rumah, tetapi sang Ibu yang secara sosial dihadapkan pada tanggung-jawab pengasuhan dan memastikan keselamatan sang anak, akhirnya meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumah. Dalam dua kasus ini, peran-peran domestik yang menjadi konstruksi sosial seperti menyiapkan makanan, mengasuh dan memastikan keamanan bagi anak, membuat kerentanan terhadap bencana dirasakan berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Elaine Enarson dalam papernya yang berjudul “*Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connection*”, menjelaskan bahwa risiko terhadap bencana terdistribusikan secara berbeda di dalam masyarakat. Menurutnya, sebagai sebuah konsep yang kompleks, kerentanan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya, yang yang dibutuhkan baik untuk bertahan hidup maupun menjalani masa recovery setelah bencana. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perempuan dan anak perempuan adalah merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang berada pada daftar kelompok dengan risiko tinggi terhadap bencana (Earson, 2000). Mengutip studi kasus bencana alam di Bangladesh yang dilakukan oleh K. Ikeda, pola kematian akibat bencana dipengaruhi oleh relasi gender yang ada, meskipun ini tidak selalu konsisten. Pola ini menempatkan perempuan lebih berisiko karena keterbatasan mobilitas secara fisik dalam situasi emergency. Sementara laporan yang dikeluarkan oleh UN/IASC pada tahun 2001 berjudul “*Women, Disaster Reduction and Sustainable Development*” menyebutkan bahwa perempuan menerima dampak bencana yang lebih berat. Perempuan menjadi mayoritas dalam daftar 120 ribu orang yang meninggal akibat badai siklon di

Bangladesh tahun 1991 karena norma kultural membatasi akses mereka terhadap peringatan bahaya dan juga akses ke tempat perlindungan. Sayangnya, seperti juga dalam banyak bencana, tidak tersedia data korban bencana yang tersegregasi berdasar jenis kelamin untuk melihat potret lebih detil dari pola dan kecenderungan ini.

Ketiadaan data korban berdasar jenis kelamin ini juga nampak dalam database resmi yang dikeluarkan lembaga pemerintah baik dalam kasus bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa di Jogja dan Jateng, serta hampir semua bencana yang terjadi secara beruntun akhir-akhir ini. Di dusun Gedongan, kondisi ini juga didapati, di mana tidak ada data pilah tentang korban gempa. Data yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Korban dan Kerusakan Gempa
di Dusun Gedongan, Piyungan

Hal	Jumlah
Jumlah penduduk	281 orang
Korban meninggal	8 orang
Luka Berat	15 orang
Luka ringan	50 orang
Rumah roboh	90%
Rumah rusak ringan	10%
Ibu hamil	5 orang
Ibu-ibu	140 orang
Balita	20 anak
Jompo	34 orang

Ketiadaan data pilah ini membuat kerentanan ini tidak terkonfirmasi oleh data kuantitatif dan membuat tidak memadainya basis data yang sangat diperlukan untuk perumusan program recovery pasca bencana yang tepat sasaran dan pendekatan. Walau begitu, peserta workshop di dusun Sumur, Kemalang yang berada di lereng Merapi juga menyepakati bahwa aspek gender dalam analisis kerentanan ini sangatlah kuat. Mereka menyepakati, bahwa kelompok yang paling rentan saat bencana adalah kelompok usia lanjut, balita, ibu hamil dan orang yang mengalami cacat fisik dan mental.

Sebagaimana dua ilustrasi di Bantul di atas, peran gender yang diterima sebagai konstruk sosial membuat mobilitas ketika terjadi gempa menjadi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mobilitas ini dipengaruhi antara lain oleh konstruksi bangunan rumah, yang dalam situasi gempa, pembagian peran dan juga siklus harian masyarakat yang berkorelasi dengan tingginya risiko bencana. Dalam PRB, siklus harian menjadi alat sederhana namun

penting dalam menggambarkan peta kerentanan pada tingkat yang paling kecil, yaitu di level keluarga. Analisis ini menunjukkan pembagian peran antar anggota keluarga, antara bapak, ibu dan anak dan bagaimana ini berkorelasi dengan tingkat kerentanan yang dihadapi masing-masing terhadap bencana.

Tabel 2
Siklus Harian
Masyarakat Dusun Gedongan

Siapa	Kemana	Kapan	Untuk Apa	Risiko
Bapak	Pasar	Tiap hari, jam 06.00 – 11.00	Dagang	Untung/rugi
	Kantor	Tiap hari, jam 07.00 – 15.00	Bekerja	Terlambat
	Sawah	Tiap hari, jam 15.00 – 17.00	Tani	Gagal Panen
Ibu	Di rumah	Tiap hari	Pekerjaan rumah tangga	Capek
	Pergi	Tiap pagi, jam 07.00 – 09.00	Ngantar anak	Capek
	sawah		Bertani	Capek, gagal panen
Anak	Ke sekolah	06.30 – 13.00	Belajar	
	Keluar rumah	13.30 – sore	Bermain	Bertengkar dengan teman
	Ke sekolah/masjid	16.00	Belajar TPA	

Walau relatif menggambarkan siklus harian, perumusan risiko dalam proses PRB di dusun Gedongan dalam tabel di atas masih harus dipertajam. Rumusan yang dihasilkan memang masih jauh dari memadai untuk melihat relasi antara siklus harian, pembagian peran berdasar gender dan kaitannya dengan risiko dan kerentanan terhadap bencana. Mungkin data ini harus di tindaklanjuti dengan penjelasan tentang risiko, dan dengan menggunakan alat bantu dan pertanyaan kunci yang sederhana dan mudah dipahami warga.

Sementara menurut penuturan para perempuan peserta workshop mentoring peredaman risiko bencana di dusun Jabung, Gantiwarno. Mereka menuturkan, bahwa saat gempa terjadi, yaitu jam 6 pagi kurang sedikit, ibu-ibu masih berada di dapur karena sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Ketika gempa mengguncang, sebagian terlambat menyadari karena sedang sibuk memasak dan aktivitas domestik yang lain. Selain itu, konstruksi dapur juga biasanya tidak sekuat bagian rumah yang lain karena dianggap bukan merupakan bagian inti rumah, dan akses keluar rumah dari dapur tidaklah sedekat dan semudah bagian rumah yang lain seperti ruang tamu. Apalagi, ketiadaan pengetahuan dan informasi yang sampai ke masyarakat bahwa daerah mereka merupakan daerah rawan gempa, membuat konstruksi rumah secara keseluruhan –apalagi dapur yang dianggap lebih

belakangan- tidak tanggap gempa. Dalam istilah tempatan, rumah yang sekedar sebagai tempat *ngiyup* atau berteduh sudahlah memadai untuk menjadi tempat tinggal keluarga. Bila rumah serentan itu, maka kerentanan di dapur akan lebih tinggi lagi.

Dalam analisis pembagian kerja yang juga menjadi salah satu fokus utama analisis gender, relasi dengan kerentanan nampak dengan jelas dalam ilustrasi di atas. Pembagian kerja ini membuat mobilitas, tanggung-jawab, akses terhadap evakuasi, dan juga keterlibatan serta akses terhadap program recovery bisa menjadi sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tabel di bawah ini menunjuk dengan jelas bahwa pembagian kerja ini juga berarti pembagian ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Dalam masa darurat misalnya, peran penyediaan makanan melalui dapur umum adalah peran yang banyak dipegang dan secara kultural juga terposisi sebagai tanggung-jawab perempuan. Sementara laki-laki melakukan aktivitas penggalangan bantuan dari luar melalui pembuatan usulan dukungan bantuan dalam bentuk proposal. Demikian juga halnya pada pemulihan. Walaupun perempuan ikut membantu membersihkan puing-puing rumah, tetapi pekerjaan pendataan rumah rusak, serta pengelolaan bantuan untuk pembangunan kembali rumah baik melalui dukungan dana dari pemerintah ataupun pihak lain, adalah ruang dan otoritas laki-laki.

Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, menyangkut sejauh mana pola pembagian ini, memberi ruang bagi keterlibatan perempuan, dan sekaligus juga mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Belajar dari pengalaman terdahulu, dimana dapur sebagai ruang perempuan tidak menjadi prioritas dari segi keamanan dalam pembangunan rumah, kondisi yang sama berpotensi untuk terjadi lagi dalam pembangunan kembali rumah. Karena bukankah ketidakterlibatan perempuan dalam pembangunan kembali rumah di fase pemulihan menjadi bisa diartikan tidak adanya jaminan bagi akomodasi suara dan kepentingan perempuan? Beberapa pertanyaan ini terlontar dan sempat terbahas dalam workshop misalnya di Jabung yang semua partisipannya adalah perempuan.

Tabel
Peta Pembagian Peran dalam Keluarga di dusun Gedongan

Pihak	Saat Bencana	Fase Darurat	Fase Pemulihan	Mitigasi
Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menangis • Mencari orang tua • Kebingungan • Ketakutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Trauma • Ingin selalu dekat dengan orang tua • Sakit-sakitan • Jarang mandi • Menyelamatkan alat sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai berangkat sekolah • Mulai mengikuti kegiatan dari LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kegiatan bermain yang jauh dari keluarga • Belajar menyelamatkan diri jika sewaktu-waktu ada bencana
Ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Meyelamatkan diri • Melakukan p3k • Cari minum dan makanan kecil • Mencari tempat yang aman untuk berlindung • Mencari air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari bahan makanan • Mencari peralatan masak • Membuat dapur umum • Memasak • Membagi makanan yang sudah matang 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu membersihkan puing-puing • Memasak • Mulai menjalankan organisasi masyarakat • Mulai ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan dan menjaga anak • Mengikuti pelatihan dari LSM
Bapak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelamatkan diri • Mencari keluarga • Membantu tetangga yang kena korban • Mengurus korban yang meninggal • Membuat tempat berlindung / mendirikan tenda 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurus bantuan • Mengajukan proposal bantuan • Menjaga keamanan kampung • Mencari dan memperbaiki penerangan • Membentuk panitia posko bantuan • Menyelamatkan harta benda yang masih tersisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan puing-puing bangunan • Membuat rumah sementara • Mulai melakukan aktifitas kerja • Mengajukan data-data korban/rumah roboh 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah dengan kontruksi tahan gempa • Melakukan ronda • Selalu siap siaga jika sewaktu-waktu ada bencana

Peta kalender musim yang dilakukan dalam proses PRB juga membantu menganalisis kerentanan dengan menunjukkan pola dan kecenderungan keamanan stok pangan, keamanan ekonomi dan keuangan keluarga. Pada bulan-bulan tertentu, masyarakat berada pada kerentanan secara ekonomi dan finansial yang tinggi, karena misalnya belum panen atau masa sepi bagi yang usaha. Contoh ini nampak dari catatan di Jabung berikut ini :

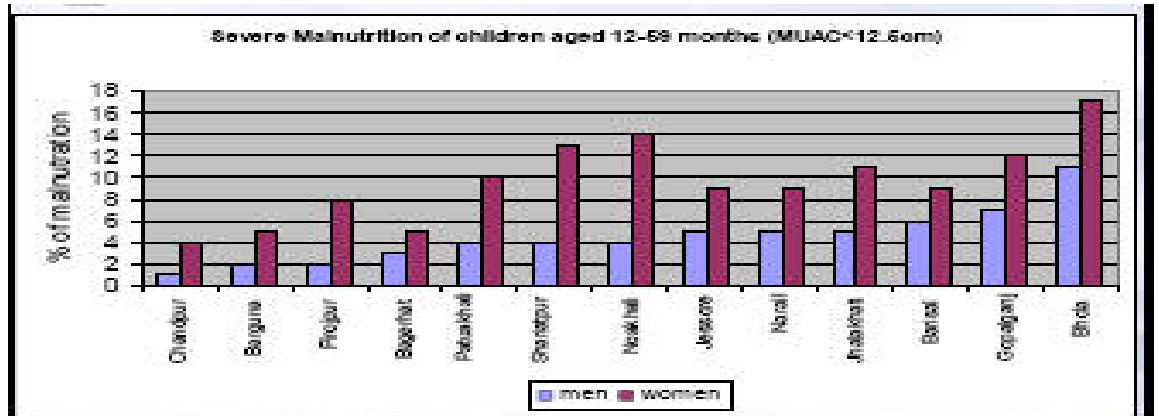
....Kalau bulan-bulan seperti Januari, April, Mei, Agust, Sept, untuk usaha atau membuka toko, agak ramai. Petani punya uang karena panen baik yang disawah ataupun yang lahannya disewakan kepada pabrik tembakau. Tetapi, di luar bulan itu, ya sepi karena pada nggak punya uang. Jadi, kebanyakan ngutang di warung....

Tetapi, beberapa saat kemudian, periode panen atau usaha ramai akan menjadi penutup pola hidup subsisten ini : ngutang, bayar, utang lagi, dan seterusnya. Tingkat kerentanan terhadap bencana di daerah ini akan berbeda, tergantung pada siklus musim yang sedang berjalan. Kerentanan dan ancaman yang dihadapi masyarakat akan menjadi semakin tinggi, bilamana bencana terjadi pada saat paceklik, atau masyarakat sedang menunggu musim panen sehingga keamanan dan stok pangan, serta keamanan finansial menjadi sangat rendah. .

Kalender ini juga menunjukkan aktivitas sosial dan komunal penting yang terjadi di dalam masyarakat seperti halnya bulan-bulan dimana banyak orang punya gawe sehingga pengeluaran sosial masyarakat menjadi sangat banyak dalam periode ini. Dalam periode ini, kerentanan masyarakat termasuk perempuan meningkat karena otomatis pengeluaran banyak dan bahkan seringkali dengan menguras tabungan atau berutang.

Merunut Dampak Bencana : Mulai dari Kesehatan

Selain pada tahap emergency, dampak lanjutan dari bencana juga bisa tersegregasi berdasar peran gender yang berbeda. Satu studi yang dilakukan Fakhruddin terhadap bencana banjir di Bangladesh menunjuk dampak jangka panjang dari bencana bagi status gizi anak yang berbeda, antara bagi anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini :



Sumber : “Gender and Disaster Risk Management”, Fakhruddin, Water Resource Engineer, Center for Environment and Geographic Information Services, Bangladesh, Gender Ambassador, GWA

Dalam grafik di atas, data ini secara konsisten menunjukkan bahwa malnutrisi lebih banyak menimpa anak perempuan, dibandingkan dengan anak laki-laki di semua daerah yang terkena bencana.

Bagaimana pengalaman bencana yang dialami masyarakat membawa dampak bagi kesehatan? Dua bencana, membawa dampak kesehatan yang juga berbeda. Di Gedongan, identifikasi dampak bencana gempa yang dirasakan oleh masyarakat adalah :

- Kelaparan (dalam jangka pendek ketika hari H bencana)
- Kurang Gizi
- Banyak penyakit, Misal sakit mata, batuk, dan pilek. Penyakit ini banyak ditemukan misalnya ketika periode bersih-bersih rumah, dan masih tersisa juga ketika orang-orang mulai membangun rumah karena banyaknya debu dari material dan sisa bangunan lama. Apalagi, ketika gempa terjadi, sedang masuk musim kemarau sehingga debu menjadi masalah yang memicu munculnya beberapa penyakit seperti terurai di atas.

Sementara, bencana Merapi yang di dusun Sumur berupa hujan abu dan awan panas yang merusak tanaman juga membawa dampak bagi kesehatan. Muncul persoalan mulai dari iritasi mata, batuk dan sesak napas, serta gatal kulit di sekujur tubuh karena air mandi terkontaminasi oleh abu dan diare serta demam. Di dusun Sumur, problem dan keterbatasan air bersih juga dirasakan pada saat normal dan menjadi semakin parah pada saat bencana. Hal ini dikarenakan, di tempat ini hanya ada empat buah tempat penampungan air bersih dengan kapasitas sekitar 25.000 liter. Dari keempat ini, hanya satu buah yang merupakan bak milik umum yang menjadi bagian dari program Bank

Dunia. Dengan jumlah bak yang terbatas, hanya bisa mencukupi sepertiga kebutuhan penduduk selama kurang lebih satu bulan, biarpun bak pribadi juga digunakan secara bersama-sama. Periode krisis air bersih biasanya dirasakan selama 3 bulan, tetapi di musim kemarau kemarin bahkan sampai 6 bulan yang mana tidak ada bantuan air bersih dari manapun. Dalam situasi seperti ini, warga harus membeli sendiri air bersih sebanyak 5000 liter/bulan/KK atau harus mengeluarkan uang senilai Rp 150.000,-

Sayangnya, proses PRB yang terbatas tidak sempat mengelaborasi lebih dalam, apakah dampak ini dirasakan sama dan identik oleh kelompok gender yang berbeda. Dalam kondisi keterbatasan air bersih misalnya, yang terasa sekali ketika bencana di musim kemarau, maka air diutamakan untuk keperluan memasak. Akibatnya, kebutuhan kesehatan dan sanitasi menjadi terkorbankan, dan anak-anak serta perempuan akan menjadi sangat kerepotan karena mereka membutuhkan air dalam volume yang lebih banyak dan untuk lebih beragam keperluan. Kondisi dan isu kesehatan kelompok khusus sebagai dampak bencana juga tidak sempat dibahas, misalnya menyangkut kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan bagi lansia dan difabel.

Bagaimana dampak lanjutan dari bencana bagi laki-laki dan perempuan dewasa? Tabel berikut yang juga terdapat dalam makalah yang sama menunjuk *impact* bencana yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tabel
Segregasi Gender dalam Dampak Banjir di Bangladesh

Dampak Banjir	Laki-laki	Perempuan
Makanan dan Nutrisi :		
Ketidakamanan pangan	+	+++
Berkurangnya supply makanan	+	+++
Berkurangnya konsumsi		+++
Berkurangnya kalori		+++
Kesehatan dan Sanitasi :		
Penyakit		+++
Diare		+++
Kolera		+++
Penyakit kulit	++	+++
Trauma psikologis		++
Trauma fisik	+	+++
Ketiadaan layanan medis		+++
Ketiadaan sanitasi		+++
Sumber Daya dan lain-lain :		
Ketiadaan lahan	+	++
Ketiadaan uang	+	++
Menjual asset	++	++
Upah rendah		+++

Ketidakamanan		+++
Ketiadaan proteksi		+++

Sumber : op.cit

Nampak bahwa pada hampir semua hal yang terdapat dalam tabel di atas, perempuan menerima dampak yang lebih berat daripada laki-laki. Tercatat hanya pada persoalan terpaksa menjual asset, perempuan dan laki-laki dihadapkan pada persoalan dengan derajat yang sama. Pada banyak hal yang lain, bahkan laki-laki tidak merasakan dampak, tetapi yang dirasakan oleh perempuan adalah dampak dengan intensitas yang tinggi. Ini nampak mulai dari persoalan berkurangnya konsumsi dan kalori, dampak kesehatan berupa diare, penyakit menular dan kolera, ketiadaan layanan medis dan sanitasi, hingga persoalan upah rendah, ketidakamanan hingga ketiadaan proteksi pada ranah sumber daya.

Persoalan keamanan pangan ketika terjadi bencana juga dirasakan sebagai masalah utama ketika bencana. Di dusun Sumur, dampak ini berkorelasi dengan pola konsumsi pangan yang ternyata mengalami pergeseran dan tidak sesuai dengan daya dukung dan kapasitas lokal. Satu catatan yang muncul atas kondisi ini adalah :

.....Ketika terjadi bencana ternyata kebutuhan utama korban adalah makan. Sementara di dukuh Sumur ini makanan pokok seluruh warganya adalah beras. Padahal di wilayah sini tidak memproduksi beras.....Seharusnya yang menjadi makanan pokok bukan hanya beras.....

Dampak dalam Sumber-Sumber Penghidupan

Dampak bencana pada sektor-sektor ekonomi dan sumber-sumber penghidupan juga perlu mendapat perhatian khusus. Enarson menulis bahwa keamanan ekonomi adalah faktor kunci dalam kerentanan sosial. Bencana mengganggu perdagangan dan pasar, menghancurkan faktor produksi dan infrastruktur, dan secara agregat mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Sebaliknya, kepastian pendapatan, akses kepada tabungan atau kredit, pekerjaan dengan proteksi sosial, memiliki ketrampilan yang laku di pasar, pendidikan dan training serta kontrol terhadap aset produktif akan memungkinkan orang bahkan dalam situasi yang berat akibat bencana, bisa bertahan hidup. Dengan ini, mereka akan bisa mengurangi kerugian dari bisnis, bisa pindah tempat tinggal bila diperlukan, bisa membangun kembali rumah dan bisnisnya, dan tentu saja, akan bisa segera mengganti alat-alat produksi yang dibutuhkan.

Di Sumur, kerentanan dirasakan tinggi karena ketika bencana terjadi, awan panas dan abuMerapi membuat hampir semua tanaman rusak kecuali jagung dan ketela. Akibatnya, tak ada hasil yang bisa dipanen bila bencana datang, diluar kedua tanaman ini. Mereka menuturkan sebagai berikut :

Pengalaman yang lalu kerugian yang paling terasa terutama pada tanaman dan ternak. Ini saya ceritakan pengalaman bencana yang sudah-sudah. Tanaman, contohnya pada petani yang menanam hortikultura, sebelum bencana kondisi tanaman baik. Tapi setelah hujan abu semua tanaman hancur. Tidak bisa panen. Padahal modal yang diperlukan besar. Ya..... Ditambah lagi kalau yang pabrikan tidak cukup hanya membeli bibitnya thok, harus membeli juga pupuk, mulsa, dan obatnya. Padahal pemberian obatnya tidak boleh terlambat. Itulah yang menyebabkan kerugian waktu bencana kemarin menjadi besar. Bibitnya mahal, pupuk, mulsa, dan obatnya juga mahal. Kena hujan abu, hancur semuanya. Juga ternak. Sebelum bencana ternaknya gemuk-gemuk karena makanannya segar. Setelah bencana, ternak menjadi kurus karena makanan dan minumannya tercampur abu, sehingga tidak enak. Ditambah lagi selama mengungsi tidak ada yang mengurus ternak. Kalau dijual harganya rendah. Pasca bencana, cadangannya ya sapi itu. Bisa dijual untuk membeli bahan makanan. Tapi kalau sapinya mati, ya kami bingung. Solusinya paling-paling hutang.....

Dalam PRB, warga sempat membuat kerugian ekonomis yang dihadapi bilamana terjadi bencana. Hitungan ini menyadarkan mereka bahwa mereka dihadapkan pada kerentanan dari sisi ekonomi dan sumber penghidupan yang akut karena besarnya kerugian yang mereka tanggung. Ini nampak dalam hitungan di bawah ini :

Jumlah total pemasukan selama satu tahun : Rp12.765.000,-
 Jika terjadi bencana abi, maka pendapatan masyarakat yang hilang karena tidak dapat panen sebesar :

No	uraian	Biaya (Rp)
1.	Koro (300kg x 200)	60.000
2.	Loncang	1.800.000
3.	Sawi 100kg x 3 x 600	1.800.000
4.	Cabe 100kg x 2000	200.000
5.	Tembakau	1.250.000
6.	Bunga mawar	1.000.000
7.	Kentang 100kg x 2 x 1500	300.000
8.	Kembang kol 500kg x 2 x 2500	1.250.000
	Jumlah total	8.440.000

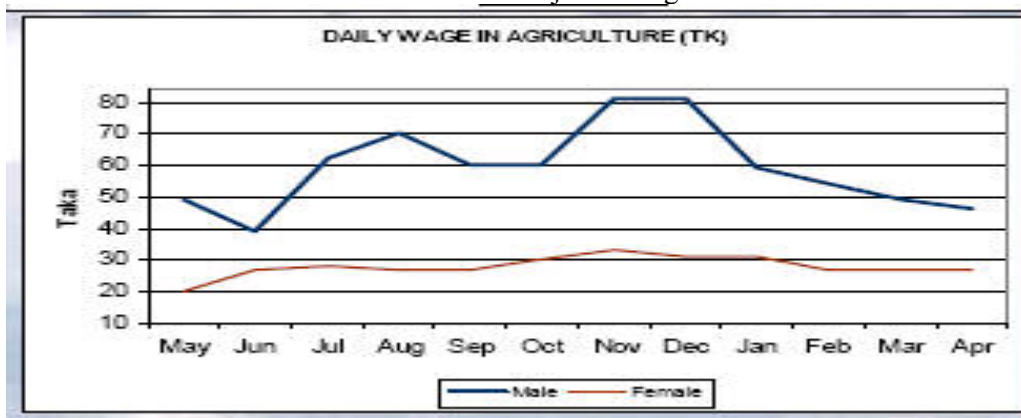
Jadi yang menjadi kerugian warga selama mengungsi, minimal sebesar 8.440.000

Sementara di Gedongan, gempa mengakibatkan gagal panen karena parit dan sarana irigasi kering, tanah sawah pecah-pecah dan tidak bisa ditanami. Di luar yang

bekerja sebagai petani, warga juga dihadapkan dengan persoalan berkurangnya penghasilan. Padahal, pada saat yang bersamaan, mereka dihadapkan pada meningkatnya harga bahan makanan.

Bagaimana dengan dampak bencana bagi sektor ekonomi dan sumber penghidupan bagi perempuan, apalagi perempuan miskin? Bagi perempuan miskin, kemampuan untuk bisa menghasilkan uang setiap hari adalah strategi bertahan hidup yang esensial. Sayangnya, mereka seringkali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Seperti bagian di atas yang mengurai dampak yang lebih berat dirasakan perempuan pada berbagai sektor, demikian pula halnya dampak pada sektor ekonomi. Inilah gambaran dari dampak bencana banjir pada tingkat upah harian di Bangladesh pada sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh Fakhruddin sebagai ketimpangan upah yang sangat lebar. Grafik berikut meng gambarkannya :

Grafik 1.
Impact Banjir pada Tingkat Pendapatan Harian
Pada Kasus Banjir di Bangladesh



Grafik di atas menunjukkan bahwa disparitas ini begitu nyata, karena di hampir semua bulan, upah perempuan tak lebih dari separuh upah yang diterima oleh laki-laki. Sayangnya, dalam hal ini, Fakhruddin tidak membandingkan dengan pola pengupahan sebelum bencana. Hal ini bisa menjebak, karena dengan menggunakan pembandingan kasus di Indonesia, dalam situasi normal saja, upah perempuan di berbagai sektor memang jauh lebih rendah daripada upah laki-laki. Data Susenas 1999 menunjukkan bahwa upah perempuan hanyalah sebesar 60% dari upah laki-laki.

Karenanya, mengamankan sumber dan kapasitas ekonomi merupakan langkah esensial dalam jangka panjang. Tetapi, perlu diperhatikan, bahwa mempertahankan pola sumber dan kapasitas ekonomi status quo malah bisa meningkatkan risiko yang dihadapi oleh perempuan. Salah satu contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Oxfam dalam

kerentanan terhadap topan Mitch di Honduras. Studi ini menunjukkan bahwa 27% perempuan di kawasan ini merupakan kepala keluarga, dimana 72% diantaranya merupakan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam situasi yang lain, di Guatemala, 30 tahun bencana konflik mengakibatkan satu diantara sepuluh perempuan menjadi janda (Trujillo, et.al, 2000, seperti dikutip Earson, 2000). Menghadapi kondisi seperti ini, harus ada terobosan untuk meningkatkan derajat hidup perempuan, sehingga program bantuan bencana akan membuat mereka bisa hidup dengan bermartabat. Artinya, program bantuan harus menasar akar masalah yang menyebabkan rendahnya derajat kehidupan ekonomi perempuan, yang mungkin saja diperparah oleh konstruksi sosial ekonomi politik dalam situasi bencana. Dengan kata lain, bisa jadi program bantuan malah menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi yang sama sekali baru, atau yang berbeda dengan program sejenis sebelum bencana, bilamana pendekatan yang sama justru melanggengkan ketimpangan gender dan rendahnya derajat kehidupan.

Program bantuan juga harus berhati-hati dalam hal ini, karena ketidaktepatan pendekatan atau pendekatan yang mengabaikan perempuan, bahkan bisa berimplikasi pada semakin dalamnya ketimpangan gender. Program recovery ekonomi misalnya, bila hanya mengakui pendekatan laki-laki sebagai kepala keluarga, akan bisa membuat keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarganya akan menjadi semakin tertinggal. Ilustrasi berikut juga harus dicermati dengan lebih teliti, untuk melihat konstruksi gender seperti apakah yang bermain dan mempengaruhi pola pembangunan dan pengembangan ekonomi komunitas.

Menurut perempuan peserta workshop di Jabung, bencana juga membuat berkurangnya lapangan kerja, walaupun untuk beberapa pekerjaan justru semakin banyak peluangnya. Pekerjaan menjadi buruh bangunan adalah salah satu pekerjaan penting yang melonjak permintaannya setelah terjadi bencana, karena semua orang butuh tukang untuk renovasi rumah. Mengikuti hukum dasar permintaan dan penawaran, hal ini juga diikuti dengan meningkatkan upah tukang dan buruh bangunan. Sayangnya, peluang ini tidak ditangkap oleh semua orang di dusun ini, yang membutuhkan pekerjaan. Dalam workshop, ibu-ibu menuturkan bahwa tidak semua orang mau menjadi tukang atau buruh bangunan, yang terklasifikasi sebagai pekerjaan kasar. Faktor nilai dan gengsi pekerjaan menjadi dasar penolakan oleh sebagian orang –yang mayoritas adalah laki-laki– atas opsi ini.

Namun, hal ini tidak ditemukan pada perempuan. Keterbatasan pilihan pekerjaan di satu sisi, dan desakan kebutuhan di sisi yang lain, membuat perempuan mengambil pilihan pekerjaan dengan mengesampingkan banyak hal.

*.....Kalau perempuan, biasanya lebih luwes dan lebih arif. Karena kebutuhan yang mendesak,
ya.. kalau pilihannya menjadi TKW atau menjadi buruh pabrik, akan diambil.
Nggak ambil
pusing dengan gengsi, yang penting bisa bertahan hidup....*

Menurut penuturan peserta workshop, hal ini antara lain ditandai dengan meningkat jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKW setelah gempa. Sayangnya, proses workshop tidak sempat mendata pergeseran jumlah dan kecenderungan kenaikan perempuan yang kemudian memilih menjadi pekerja di negeri orang, yang sebetulnya tidak selalu aman dan mensejahterakan. Perempuan juga relative tidak ambil pusing dengan gengsi, ketika banyak diantara mereka yang kemudian menjadi buruh pabrik karena desakan kebutuhan. Dalam bahasa ibu-ibu, perempuan lebih luwes dalam mensikapi kondisi dan keterdesakan. Sayangnya, workshop juga tidak sempat mengelaborasi, selain dari factor internal perempuan sendiri, factor eksternal apakah yang mendorong kecenderungan dan pola ini. Misalnya saja, apakah ada dorongan dari pemilik pabrik untuk lebih memilih perempuan sebagai buruh karena upahnya lebih rendah daripada laki-laki sehingga lebih menguntungkan?

Hal lain lagi yang juga perlu diperhitungkan dalam program bantuan untuk pengembangan ekonomi adalah sejauh mana kontrol terhadap sumber daya, salah satunya adalah modal. Lagi-lagi, di dusun yang sama, ibu-ibu menuturkan, keterbatasan modal adalah salah satu kunci penghambat kemajuan usaha ekonomi perempuan. Mereka mencontohkan, bahwa sebelum gempa, ada beberapa kegiatan pelatihan dan dukungan alat bagi perempuan untuk usaha menjahit. Tetapi, usaha ini tidak bisa berkembang, karena keterbatasan modal dan keterbatasan akses terhadap pasar. Sebetulnya ada beberapa pilihan akses terhadap modal di daerah ini, mulai dari pinjaman ke koperasi di mana mereka menjadi anggotanya, pinjam ke bank komersial, atau pilihan yang terakhir yaitu bank plecit (bank harian) dan rentenir. Adalah menarik untuk melihat kepolosan dan kejujuran ibu-ibu berikut ini :

.....Memang bunga di bank plecit tinggi. Tapi, bagaimana lagi, kami sering didesak oleh kebutuhan. Selain itu, proses meminjamnya juga mudah dan tidak perlu pakai agunan. Juga tidak ribet, karena setiap saat bisa segera cair asal ada kesepakatan dengan pinjam dan tidak perlu tanda terima segala. Tentang bunga

yang tinggi, biasanya disiasati dengan disisihkan dari nilai pinjaman ketika pinjaman cair, beserta dengan biaya administrasinya.....

Mereka mengakui, dengan mekanisme seperti itu, bank plecit menduduki ranking teratas sebagai alternatif pinjaman yang paling gampang diakses dan disenangi untuk menutupi kebutuhan akan modal dan uang cash. Hal yang sama juga nampak dari pilihan meminjam ke rentenir, yang juga mudah dan tidak ribet, serta tidak mengenal jam kerja. Preferensi ini berlaku bukan hanya bagi usaha jahit, karena keluwesan dalam hal prosedur dan mekanisme peminjaman ini juga mereka gunakan untuk menyambung hidup yang semakin sulit. Kemudahan meminjam uang ini menutupi kelemahan mendasar bank plecit dan rentenir yang tanpa kompromi karena bunganya yang sangat mencekik leher.

Terhadap bank komersial, mereka mengeluhkan ribetnya administrasi untuk pengajuan kredit yang membuat banyak perempuan miskin malas atau tidak bisa memenuhi standar prosedur peminjaman. Demikian pula halnya dengan koperasi, yang menurut penuturan mereka, seringkali menjadi terasa berat justru karena mekanisme kolektif yang dikembangkan sebagai dasar dan ruh koperasi terasa memberatkan. Tanggung renteng misalnya, dikeluhkan seorang peserta berikut ini :

.....Ya malu kalau diumumkan ke semua anggota sebagaimana ketentuan pinjaman. Wong mau utang kok diumumkan. Juga agak ribet karena kalau mau utang, harus tanda tangan semua anggota kelompok.....

Isu akses modal dan pinjaman ini menjadi salah satu isu kunci yang memakan waktu pembahasan yang cukup panjang dalam workshop di dusun ini. Memang workshop ini belum sempat terumuskan pola baru, yang berbeda dan orisinal untuk di jadikan strategi recovery ekonomi. Penulis mencatat penuturan fasilitator dari mitra berikut ini :

.....Memang masalah modal dan pengembangan usaha adalah masalah yang pelik. Kalau hanya terobosan pelatihan ketrampilan sebagaimana yang tadi terumuskan, menurut saya tidak ada yang baru karena strategi itu juga kami lakukan sebelumnya. Yang diperlukan adalah terobosan dan pembaharuan strategi yang mendasar. Perlu strategi yang orisinal.....

Penuturan ini sekaligus juga mengkonfirmasi, dalam situasi bencana, recovery ekonomi dihadapkan pada tantangan berupa situasi yang akut dan mendapat dukungan dari pranata yang ada. Terobosan yang benar-benar baru atau berbeda dengan pendekatan

pengembangan ekonomi sebelum bencana diperlukan, karena pendekatan biasa ternyata melanggengkan ketimpangan dan penghisapan ekonomi.

Informasi dan Relasi Antar Pihak

Enarson juga merinci daftar isu yang berkorelasi dengan ketidaksetaraan gender pada beberapa hal yang menghasilkan kerentanan terhadap bencana yang berbeda. Pembatasan kultural, politik, perbedaan strata pendidikan, perbedaan akses terhadap informasi serta keterbatasan mobilitas yang sering dijustifikasi baik oleh norma agama ataupun budaya, juga bisa berimplikasi pada keterbatasan akses perempuan untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam masa setelah bencana (Enarson, 2000).

Variabel informasi misalnya, sangat mempengaruhi kerentanan karena tanpa informasi, orang menjadi tidak tahu bahwa ia berada dalam kerentanan dan ancaman. Peserta workshop di dusun Jabung mengatakan, sejak dari dahulu kala, mereka tidak tahu dan bahkan tidak terlintas bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak membuat strategi antisipasi terhadap bencana, baik mulai dari variabel konstruksi tempat tinggal atau strategi pengelolaan sumber daya dan tabungan untuk menghadapi situasi krisis. Pun ketika bencana terjadi. Informasi tentang kemungkinan gempa susulan, atau program bantuan bencana yang dikelola pemerintah atau pihak lain, biasanya disebarkan biasanya melalui pengumuman di balai desa, melalui aparat desa, atau melalui pertemuan warga. Mekanisme ini, secara umum bisa diakses lelaki, tetapi tidak secara otomatis bisa diakses oleh perempuan. Di luar ini, mekanisme yang relatif punya jangkauan luas adalah lewat jalur pengeras suara di masjid. Untuk keperluan evakuasi, di dusun ini tersedia truk sebanyak 2 buah dan mobil sebanyak 5 unit.

Mari kita lihat kondisi di lereng Merapi. Identifikasi media informasi oleh warga merinci mulai dari handy talkie sebanyak 1 buah yang berguna untuk mendapatkan informasi dari BPPTK mengenai keadaan Merapi. Sementara untuk penyebaran ke warga dan mempermudah evakuasi, media yang ada hanyalah megaphone yang berjumlah 1 buah dengan dibantu oleh sirine dan accu sebanyak 1 buah. Alat ini pertama kali dipakai sebagai tanda bahaya pada tahun 2006. Tentang sirine, warga mengaku bahwa media ini menggantikan kentongan yang ditinggalkan warga karena tidak perlu ditunggu dan tinggal dinyalakan saja. Warga juga memiliki peta evakuasi, dan peralatan pendukung seperti kotak P3K. Jalur evakuasi yang ada di desa ini hanya satu arah karena jalannya sempit. Sayangnya, peta ini tidak ada keterangan mengenai arah jalur evakuasinya. Identifikasi tentang jalur evakuasi juga dilengkapi dengan peta tentang kelompok rentan

yang ada dan alat evakuasi yang dimiliki. Identifikasi ini mencakup jumlah perempuan, ibu hamil, lansia, difabel dan balita yang ada.

Yang juga tak kalah penting adalah analisis tentang kelembagaan yang ada, bagaimana lembaga ini bekerja dan mempengaruhi kondisi, kerentanan dan ancaman bencana. Di dusun Gedongan nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel
Analisis Kelembagaan Gedongan

Pihak	Aktivitas	Pengaruh	Masalah	Solusi
Pertemua selasa kliwon (bapak-bapak)	Pertemuan rutin iuran	<ul style="list-style-type: none"> • Biar masyarakat bersatu • Cepat mendapat informasi • Mempersatukan warga 	Banyak yang tidak datang	Lebih di kompakkan persatuannya
Jumat wage/ibu-ibu	Pertemuan rutin (arisan, sosialisasi, simpan pinjam, tabungan, doorprise)	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan rasa percaya diri • Menyampaikan informasi 	Jadwal sering molor	
Perkumpulan KMG (muda-mudi)	Pertemuan rutin (arisan, iuran, kerja bakti rutin)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan, melatih tanggung jawab • Bisa bertukar pikiran 	Tidak ada masalah	
Pertemuan ibu-ibu Rt. 07 setiap minggu pon	Pertemuan rutin (arisan, iuran, tabungan, social)	Bisa ngutang	Datang tidak tepat waktu	Ketua harus tegas
Posyandu 1 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kesehatan • Penimbangan balita 	Masyarakat sehat Mengetahui perkembangan anak	Balita tidak hadir 100 persen	Memberikan penyuluhan tentang kesehatan anak
LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan • Memberikan pelatihan tentang bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat jadi tergantung • Masyarakat jadi tahu tentang bagaimana resiko bencana 	Tidak rutin	Kegiatannya harap di rutinkan
Pengajian yasinan malam jumat	Ngaji, social	Menambah pengetahuan tentang agama, dan menambah iman dan tagwa kpd Allah SWT	Tidak adanya ustad untuk memberikan siraman rohani	Mencari ustad untuk memberi siraman rohani-

Analisis ini memberi gambaran tentang mekanisme dan pola kerja pengaruhnya bagi masyarakat. Tetapi, kelembagaan yang sempat diidentifikasi masih terbatas lembaga yang ada dan bekerja secara langsung pada tingkat dusun. Polanya bisa menjadi sangat berbeda bilamana cakupan analisis diperluas hingga ke level daerah atau bahkan nasional mengingat pengaruh lembaga di kedua tingkat ini tidaklah bisa dinafikkan. Program rekonstruksi dan rehabilitasi misalnya, adalah program yang dikelola dan didanai oleh pemerintah pusat, dengan beberapa hal dilimpahkan ke pemerintah daerah. Konflik dan ketegangan yang mewarnai baik menyangkut pendekatan maupun implementasi program, juga terkait baik dengan pemerintah kabupaten, propinsi ataupun pemerintah pusat. Bahkan, masuknya proyek utang melalui P2KP ataupun *Java Reconstruction Fund* membuat identifikasi aktor global juga menjadi penting.

Peminggiran perempuan dalam program pembangunan kembali rumah dengan dukungan dana dari APBN, bukanlah hanya persoalan yang sifatnya kasuistis dan terjadi hanya di beberapa tempat. Kecenderungan yang nampak hampir di semua daerah, sebetulnya terkait dan berkorelasi dengan skema kebijakan yang menjadi acuan program ini. Di DIY, harus dihitung keluarnya SK Gubernur No. 23 tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Inilah gambar nyata fakta lokal, tetapi terkait dengan kelembagaan dan kebijakan pada tingkat yang lebih luas dan bahkan bersifat global.

Di lereng Merapi, identifikasi aktor lebih beragam. Mulai dari aktor seperti perangkat desa, pemerintah daerah, PMI, polisi dan tentara, relawan, Tim SAR hingga BPPTK. Dalam peta sejarah desa, warga memetakan pengaruh yang nyata dari beberapa pihak, diantaranya adalah dari pemerintah daerah. Mereka mengidentifikasi kondisi yang mereka alami yaitu :

.....Hujan abu adalah masalah sejak dahulu. Tahun 1952 misalnya, juga terjadi hujan abu. Juga pada tahun 1975, gunung meletus sehingga warga mengungsi atas kehendak sendiri dan bukan karena perintah dari Pemerintah. Merekapun hanya mengungsi pada malam hari sehingga siang hari bisa bekerja seperti biasa. Beberapa tahun setelah itu, kami tidak mengungsi walaupun terjadi hujan abu seperti pada tahun 1992. Tapi, ketika bencana tahun 2006, kami mengungsi di Dompol selama 3 bulan. Kenapa lama? Karena mendapat perintah dari aparat dengan penjelasan bahwa sebelum mendapat pengumuman bahwa Merapi aman, kami dilarang pulang. Bila pulang, bantuan juga tidak akan cair. Kami juga mengungsi tanpa dukungan sarana transportasi untuk hilir mudik harian yang tetap harus dilakukan untuk menjaga keamanan harta benda di rumah seperti ternak. Untuk hilir mudik ini, biayanya tidak sedikit tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah.....

Ada Yang Tak Hancur Karena Gempa

Walaupun bencana mengakibatkan kerusakan, jatuhnya korban dan membawa dampak lanjutan, tetapi diperlukan bacaan dan identifikasi atas peluang-peluang yang mungkin digunakan untuk mendasari program antisipasi dan juga program recovery.

Selain itu, upaya mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana juga perlu mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah yang membuat semua pihak bisa mengambil bagian di dalamnya. Deklarasi Beijing merekomendasikan beberapa langkah kunci yang perlu diambil, yaitu :

- a) Menciptakan iklim yang responsif gender dalam kebijakan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.
- b) Mengembangkan alat untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam design, implementasi, mekanisme dan juga mekanisme money yang memadai untuk mereview program
- c) Menjamin partisipasi penuh dari perempuan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan dan dalam pengelolaan pengurangan bencana di semua level.
- d) Menjamin kondisi yang memadai bagi pemenuhan hak dasar –baik hak sipil politik, maupun ekonomi dan sosial budaya bagi perempuan. Perhatian khusus harus diberikan untuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender.
- e) Mengarusutamakan perspektif gender ke dalam riset, sektor pendidikan, pada dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, bencana dan kerentanan lingkungan, termasuk dalam penelusuran akar masalah dan mendorong pengajuan hasil riset sebagai kepada kebijakan dan program
- f) Mengumpulkan data demografi, sosial ekonomi dan data penting lain yang tersegregasi secara gender dan umur, mengembangkan indikator pembangunan nasional yang sensitif gender, dan mengkaji perbedaan gender dengan mengacu kepada manajemen lingkungan, kerusakan dan kerugian yang terjadi dan pengurangan kerentanan.
- g) Mengembangkan, mereview dan mengimplementasikan sampai tingkat yang memadai, dengan keterlibatan dan partisipasi dari kelompok perempuan, hukum yang sensitif gender, kebijakan dan program, mencakup penggunaan tanah dan perencanaan urbanisasi, sumber daya alam dan sumber daya air yang terintegrasi untuk menyediakan kesempatan untuk melindungi dan mengantisipasi kerusakan.
- h) Mendorong pengembangan dan implementasi standar bangunan nasional yang mempertimbangkan risiko kerusakan, sehingga perempuan, laki-laki dan keluarganya tidak berada pada risiko tinggi dari bencana.
- i) Mencakup pada tahap design untuk semua program pembangunan yang relevan, analisis gender dan metode pemetaan kerusakan dan kerentanan dari bencana dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen bencana, dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara.

- j) Menjamin kesetaraan akses perempuan kepada informasi dan pendidikan baik formal maupun non formal dalam pengurangan risiko bencana, mencakup sistem peringatan dini yang sensitif gender dan memberdayakan perempuan untuk ambil bagian secara tepat waktu dan dalam bentuk yang memadai.
- k) Mempromosikan aktivitas income generating dan peluang kerja, termasuk provisi mikro kredit, dan instrumen keuangan yang lain, menjamin kesamaan akses kepada sumber daya, khususnya menyangkut tanah dan kepemilikan aset, termasuk rumah dan mempertimbangkan pemberdayaan perempuan sebagai produser dan konsumen, dengan tujuan mencapai kapasitas perempuan yang memadai untuk merespons bencana.
- l) Mendesign dan mengimplementasikan pemulihan ekonomi dan proyek recovery yang sensitif gender, dan menjamin peluang ekonomi yang sama bagi perempuan, baik di sektor formal maupun non formal dengan menghitung kerugian pada tanah dan aset, termasuk rumah dan aset produktif yang lain
- m) Membuat perempuan menjadi partner setara dan penuh dalam pengembangan komunitas yang lebih aman dalam menentukan prioritas nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana dengan melibatkan pengetahuan dan kearifan, ketrampilan dan kapasitas kepada manajemen lingkungan dan pengurangan bencana.
- n) Mendukung penguatan kapasitas pada semua level untuk pengurangan risiko bencana dengan mendasarkan pada pengetahuan mengenai kebutuhan dan peluang bagi laki-laki dan perempuan.
- o) Mengajukan pendidikan formal dan non formal dan program training pada semua level
- p) Menjamin implementasi komitmen pemerintah pada agenda 21 dan Beijing Platform for Action serta Beijing+5
- q) Mendokumentasikan praktek baik dan pembelajaran, khususnya dari strategi berbasis komunitas untuk pengurangan bencana, dengan secara aktif melibatkan perempuan sebagaimana laki-laki dan menyebarluaskan informasi kepada semua stakeholders
- r) Meningkatkan dan mengembangkan program kesehatan fisik dan mental, pelayanan dan jaringan suport sosial untuk perempuan yang terancam bencana, termasuk yang mengalami trauma
- s) Memperkuat kapasitas kementerian, otoritas darurat, praktisi dan komunitas untuk mengimplementasikan pendekatan sensitif gender kepada manajemen lingkungan dan pengurangan risiko bencana dan melibatkan profesional dan pekerja lapangan
- r) mendorong kemitraan antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, NGO dan pihak terkait yang lain dalam pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dan sensitif gender untuk mengurangi risiko bencana

- t) Mendorong masyarakat sipil termasuk NGO untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam promosi inisiatif pembangunan berkelanjutan termasuk dalam pengurangan risiko bencana
- u) Menjamin koordinasi antara sistem di UN, mencakup partisipasi aktif donor, lembaga dan program khusus untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan berkelanjutan termasuk dalam aktivitas pengurangan risiko bencana.

Proses menyusun rekomendasi, panduan hingga rencana aksi dilakukan di beberapa wilayah. Bila mengacu kepada rekomendasi dari Komisi Beijing di atas, beberapa merupakan penerjemahan dari konsep di atas, sebagaimana nampak dalam perumusan konsep di dusun Gedongan berikut ini.

ATURAN – ATURAN PENANGANAN BENCANA DI DUSUN GEDONGAN

Apabila ada bencana :

1. Menyiapkan tempat untuk mengungsi yaitu :
 - Berada di timur desa, yang di pandang jauh dari pohon dan bangunan
2. Penyampaian informasi
 - melalui speaker masjid ataupun kentongan yang di anggap efektif
3. Untuk melakukan tindakan emergensi
 - kita sepakati di tempat ibu sokinah, yang nantinya di teruskan ke rumah sakit atau puskesmas
4. Untuk pembentukan posko induk
 - di sepakati di tempat bapak wardoyo dan di Bantu dengan anak posko yang berada di di setiap Rt dan pembentukan harus dengan ketentuan dua pertiga suara yang hadir dan sepertiga harus ada perempuan di dalamnya.
5. Untuk dapur umum
 - kita tentukan atau kita sepakati di setiap Rt, yang di koordinir oleh bapak/ibu Rt masing – masing
6. Pembuatan tenda darurat
 - kita sepakati di bikin di sepanjang jalan besar timur desa, yang dekat dengan dengan jalur evakuasi
7. Informasi eksternal
 - informasi kesehatan melalui puskesmas
 - informasi keamanan melalui kantor polisi
 - informasi bantuan melalui balai desa, atau pemerintah terkait.
8. Pembuatan sanitasi darurat
 - yang dekat dengan mata sumber air dan di pandang
9. Penempatan komunitas rentan dalam satu tenda, misal :
 - jompo, balita dalam satu tenda
 - perempuan harus di pisahkan dengan laki-laki dalam 1 tenda untuk menghindari pelecehan dan kekerasan
 - penyiapan tenda khusus untuk pasangan usia subur atau tenda mesra bagi pengantin baru
10. Pembuatan posko keamanan di setiap Rt, untuk memantau keamanan desa, dan lebih mengefektifkan kampling atau ronda.
11. Membentuk team atau kelompok teknik yang bertugas :

- memperbaiki listrik atau penerangan, karena listrik di anggap vital
12. Membentuk kelompok kesehatan yang bertugas :
 - melakukan tindakan emergensi, kelompok ini harus mengerti tentang kesehatan dan emergensi
 13. Membentuk kelompok kerja untuk menaganani korban yang meninggal, misal :
 - menyucikan jenazah dan menyolatkan jenazah
 - menguburkan jenazah
 14. Menyiapkan transportasi untuk mengevakuasi korban ke puskesmas atau rumah sakit yang nantinya kita minta saudaranya bagi yang punya kendaraan, terutama roda empat.

CATATAN ATAS PROSES PRB :

Selain pada level substansi, catatan dan rekomendasi Beijing di atas juga menaruh perhatian pada aspek proses yang berkali-kali ditekankan untuk menjamin partisipasi aktif dan penuh dari perempuan. Di Jabung, prosesnya memang hanya melibatkan perempuan tetapi agenda lanjutan menyepakati untuk menyebarluaskan mengajak pihak lain di luar partisipan workshop ini. Sementara di Sumur dan Gedongan, mekanisme pelibatan perempuan juga dilakukan walaupun tingkat keterlibatannya beragam tetapi sensitif gender. Di Sumur misalnya, beberapa perempuan peserta workshop juga turut membawa anaknya yang masih balita dalam proses dan ini merupakan catatan atas praktek yang baik.

Beberapa keterbatasan harus di catat disini. Di Jabung, padatnya agenda warga membawa implikasi pada pemadatan acara workshop. Di kampung ini, dari rencana workshop 3 hari, kemudian dipadatkan hanya menjadi 3 hari, karena banyaknya agenda masyarakat. Selain disibukkan dengan kerja pembangunan kembali rumah, proyek-proyek kemanusiaan dari lembaga baik internasional dan lokal yang ada di wilayah ini juga menjadi pertimbangan dan keterbatasan. Pemadatan ini membuat elaborasi untuk beberapa hal kunci tidak bisa dilakukan dengan dalam dan banyak menggunakan mekanisme penugasan kelompok yang di bawa pulang ke rumah.

Sementara di dusun Sumur yang berada di lereng Merapi, proses yang sedianya dimulai jam 9 pagi juga harus menyesuaikan dengan ritme warga. Pada pagi hari, aktivitas warga yang terdiri dari kesibukan dan kerja domestik, bekerja di ladang, hingga mencari pakan ternak berlangsung hingga jam 10 pagi. Selain itu, jam 4 sore, acara juga harus berakhir karena aktivitas rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya, durasi waktu yang terbatas juga menjadi salah satu keterbatasan dari proses workshop ini.

Terakhir, yang juga penting, antusiasme warga yang ditunjukkan dengan keterlibatan sejak hari pertama hingga hari terakhir proses di semua wilayah

menunjukkan bahwa proses ini menemukan tempatnya di masyarakat. Masyarakat peserta workshop mengaku mendapat banyak pembelajaran dari proses ini, walaupun untuk beberapa hal masih menjadi catatan. Di Jabung, peserta masih menanyakan kemanfaatan proses workshop bagi upaya antisipasi bencana yang menurut mereka masih kurang jelas dan kurang tajam. Kiranya, beberapa kekurangan ini memang perlu disikapi dan ditindaklanjuti sehingga tujuan besar pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan akan tercapai.